



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI WIBOWO, SH**

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **dr. AGUNG SULISTYA WARDHANI, M.MKes**

Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,

dr. AGUNG SULISTYA W., M.MKes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630106 198903 2 007

Pihak Pertama,

BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bagian Hukum	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Bagian Hukum	81 (skor)
2.	Meningkatnya fasilitasi layanan dan informasi produk hukum daerah	Persentase permohonan pelayanan dan informasi produk hukum daerah yang terselesaikan	100%
3.	Meningkatnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan	Persentase Perda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	100%
4.	Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	Persentase capaian kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum	100%
5.	Meningkatnya fasilitasi bantuan hukum	Persentase capaian kegiatan fasilitasi bantuan hukum	100%
6.	Meningkatnya pengelolaan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.642.838.620,00	-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 941.759.300,00	-
JUMLAH		Rp. 2.584.597.920,00	

Madiun, Januari 2022

**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN,**


dr. AGUNG SULISTYA W., M.MKes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630106 198903 2 007

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN,**


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IKA PUSPITARIA, SH**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI WIBOWO, SH**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

Madiun, Januari 2022

Pihak Pertama

IKA PUSPITARIA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19821213 200604 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan penelitian produk hukum Peraturan Daerah	Persentase pelayanan penelitian produk hukum Peraturan Daerah yang terselesaikan	100%
2.	Meningkatnya pelayanan penelitian produk hukum Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota	Persentase pelayanan penelitian produk hukum Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang terselesaikan	100%
3.	Terfasilitasinya penyusunan Raperda	Persentase Raperda yang telah tersusun sesuai kewenangan tugas	100%
4.	Terfasilitasinya penyusunan Peraturan Walikota	Persentase Peraturan Walikota yang telah tersusun	100%
5.	Terfasilitasinya penyusunan Keputusan Walikota	Persentase Keputusan Walikota yang telah tersusun	100%
6.	Tersusunnya dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	Persentase dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang telah tersusun	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
1.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 388.850.000,00	-
	JUMLAH	Rp. 388.850.000,00	

Madiun, Januari 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



IKA PUSPITARIA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19821213 200604 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKA PUSPITA DEWI, SH**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IKA PUSPITARIA, SH**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,


IKA PUSPITARIA, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19821213 200604 2 009

Pihak Pertama,



EKA PUSPITA DEWI, SH
Penata Muda

NIP. 19900723 201903 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Raperda	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah	6 Kegiatan
2.	Terlaksananya penelitian Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	jumlah Raperda yang dilakukan penelitian	6 Dokumen
3.	Terlaksananya rapat pembahasan Raperda	jumlah rapat pembahasan Raperda yang dilaksanakan	6 Kegiatan
4.	Terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Raperwal	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah	40 Kegiatan
5.	Terlaksananya penelitian Raperwal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	jumlah Raperwal yang dilakukan penelitian	40 Dokumen
6.	Terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah	120 Kegiatan
7.	Terlaksananya penelitian Rancangan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	jumlah Rancangan Keputusan Walikota yang dilakukan penelitian	120 Dokumen
8.	Tersusunnya inventarisasi data Propemperda	Jumlah data Propemperda yang di inventarisasi	1 Dokumen
9.	Terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Raperda	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah	6 Kegiatan
10.	Terlaksananya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan Raperwal dan Rancangan Keputusan Walikota	Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah	160 Kegiatan

Madiun, Januari 2022

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,



IKA PUSPITARIA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19821213 200604 2 009

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA,



EKA PUSPITA DEWI, SH
Penata Muda
NIP. 19900723 201903 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAHYU SRININGSIH**
Jabatan : Pengadministrasi Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IKA PUSPITARIA, SH**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,

IKA PUSPITARIA, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19821213 200604 2 009

Pihak Pertama,

WAHYU SRININGSIH
Pengatur
NIP. 19850829 200501 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI HUKUM**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah	6 Kegiatan
2.	Melakukan penelitian Raperda	Hasil penelitian Raperda	6 Dokumen
3.	Melakukan rapat pembahasan Raperda	rapat pembahasan raperda	6 Kegiatan
4.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah	40 Kegiatan
5.	Melakukan penelitian peraturan walikota	Hasil penelitian peraturan walikota	40 Dokumen
6.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah	120 Kegiatan
7.	Melakukan penelitian Rancangan Keputusan Walikota	Hasil penelitian rancangan keputusan walikota	120 Dokumen
8.	Melakukan inventarisasi data Propemperda	Hasil inventarisasi data Propemperda	1 Dokumen
9.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah	6 Kegiatan
10.	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait	Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah	160 Kegiatan

Madiun, Januari 2022

**PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


IKA RUSPITARIA, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19821213 200604 2 009

PENGADMINISTRASI HUKUM,


WAHYU SRININGSIH

Pengatur

NIP. 19850829 200501 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUNIAR KUSTANTI HADININGTYAS, SH**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI WIBOWO, SH**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

Pihak Pertama,

YUNIAR KUSTANTI H., SH
Penata Tingkat I
NIP. 19830618 200901 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ANALIS HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI
DAN PUBLIKASI

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	Jumlah dokumen	6 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen penganggaran Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	Jumlah dokumen	4 Dokumen
3.	Tersusunnya dokumen pelaporan Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan	Jumlah dokumen	4 Dokumen
4.	Tersedianya layanan administrasi ketatausahaan Bagian Hukum yang diselesaikan tepat waktu	Persentase pengendalian surat masuk dan surat keluar yang tercatat dengan baik	100%
5.	Meningkatnya pelayanan register penomoran dan pengiriman produk hukum	Persentase pelayanan register penomoran dan pengiriman produk hukum yang terselesaikan	100%
6.	Meningkatnya pelayanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase pelayanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terselesaikan	100%
7.	Terkelolanya administrasi kepegawaian Bagian Hukum	Persentase administrasi kepegawaian yang dikelola	100%
8.	Meningkatnya penyebaran informasi produk hukum daerah	Dokumen publikasi, sosialisasi dan penyebaran produk hukum daerah	3 Jenis
		Persentase produk hukum daerah yang telah dipublikasi, disosialisasi dan disebarluaskan	100%

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
1.1.	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 269.980.500,00	-
	JUMLAH	Rp. 269.980.500,00	


Madiun, Januari 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

ANALIS HUKUM AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI,



YUNIAR KUSTANTI H., SH
Penata Tingkat I
NIP. 19830618 200901 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEWI NURHAYATI**
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUNIAR KUSTANTI HADININGTYAS, SH**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,

YUNIAR KUSTANTI H., SH
Penata Tingkat I
NIP. 19830618 200901 2 004

Pihak Pertama,

DEWI NURHAYATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19860320 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADMINISTRASI UMUM**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Teregistrasinya surat masuk	Jumlah Surat Masuk	1000 Dokumen
		Persentase surat yang terdistribusi sesuai disposisi atasan	100%
2.	Teregistrasinya surat keluar	Jumlah Surat Keluar	800 Dokumen
3.	Terkelolanya Aplikasi SIKD	Persentase surat yang dikelola pada aplikasi SIKD	100%
4.	Terkelolanya Aplikasi SIK	Persentase dokumen kepegawaian yang diupdate pada aplikasi SIK	100%
5.	Terwujudnya tertib administrasi data kepegawaian	Jumlah usulan KP PNS	2 Kali
		Jumlah usulan penyesuaian jabatan	2 Kali
		Jumlah usulan penghargaan satyalancana	1 Kali
6.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah pengajuan UP/GU/TU	12 kali
		Jumlah pengajuan SPP/SPM	20 Kali
7.	Terprosesnya penomoran produk hukum	Jumlah Produk hukum	350 Dokumen
8.	Terprosesnya pengiriman produk hukum	Jumlah Produk hukum	350 Dokumen
9.	Terlaksananya pelaporan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan SPJ fungsional	12 Laporan
		Jumlah laporan SPJ GU/TU Nihil	1 Laporan

Madiun, Januari 2022

**ANALIS HUKUM AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI,**



**YUNIAR KUSTANTI H., SH
Penata Tingkat I
NIP. 19830618 200901 2 004**

PENGADMINISTRASI UMUM,



**DEWI NURHAYATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 19860320 200604 2 005**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISKA PURBASARI, SH**
Jabatan : Penyuluh Bantuan Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator
Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **BUDI WIBOWO, SH**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,

BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

Pihak Pertama,

RISKA PURBASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19871205 201001 2 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENYULUH BANTUAN HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR
PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan penelitian Kesepakatan Bersama, Perjanjian, dan Nota Kesepakatan	Prosentase konsultasi penelitian Kesepakatan Bersama, Perjanjian, dan Nota Kesepakatan yang terlayani	100%
		Persentase kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama dan nota kesepakatan yang telah tersusun	100%
2.	Meningkatnya pelayanan permasalahan hukum	Persentase konsultasi permasalahan hukum yang terlayani	100%
3.	Terfasilitasinya pemberian Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang telah terfasilitasi	100%
4.	Tersusunnya dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi HAM	3 Dokumen
5.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan KADARKUM dan Penyuluhan Hukum	3 Kegiatan
6.	Tersusunnya dokumen pelaporan Peduli HAM	Jumlah dokumen Peduli HAM	1 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran	Ket.
1.	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
1.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 282.928.800,00	-
TOTAL		Rp. 282.928.800,00	

Madiun, Januari 2022

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

PENYULUH BANTUAN HUKUM
AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM,



RISKA PURBASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19871205 201001 2 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIEN ZAELANI, SH**
Jabatan : Penyuluh Hukum Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RISKA PURBASARI, SH**
Jabatan : Penyuluh Bantuan Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Madiun, Januari 2022

Pihak Kedua,

RISKA PURBASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19871205 201001 2 017

Pihak Pertama,

DIEN ZAELANI, SH
Penata Muda
NIP. 19931121 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENYULUH HUKUM PERTAMA**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya data pelaporan Peduli HAM	Jumlah dokumen Peduli HAM	1 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen administrasi pemberian bantuan hukum	Persentase dokumen administrasi pemberian Bantuan Hukum yang terfasilitasi	100%
3.	Tersedianya data pelaporan Rencana Aksi HAM	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi HAM	3 Dokumen
4.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan KADARKUM dan Penyuluhan Hukum	3 Kegiatan
5.	Tersedianya data konsultasi penelitian Kesepakatan Bersama, Perjanjian, dan Nota Kesepakatan	Persentase tercukupinya data konsultasi penelitian Kesepakatan Bersama, Perjanjian, dan Nota Kesepakatan yang terlayani	100%
6.	Terlaksananya penelitian Kesepakatan Bersama, Perjanjian, dan Nota Kesepakatan	Persentase penelitian Kesepakatan Bersama, Perjanjian, dan Nota Kesepakatan yang terlayani	100%
7.	Tersedianya data pelayanan Permasalahan Hukum	Persentase data konsultasi permasalahan hukum yang tercatat	100%

Madiun, Januari 2022

**PENYULUH BANTUAN HUKUM
AHLI MUDA
SELAKU SUB KOORDINATOR
PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM,**



**RISKA PURBASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19871205 201001 2 017**

PENYULUH HUKUM PERTAMA,



**DIEN ZAELANI, SH
Penata Muda
NIP. 19931121 201903 1 001**